



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Jakarta, 07 Oktober 2025

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di –

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 3247/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/X/2025

Bersama ini dikirimkan dengan hormat, laporan bulanan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bulan September 2025 bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, demi meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Tembusan :

1. Arsip





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



LAPORAN BULANAN BULAN SEPTEMBER 2025

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us
(021) 22859672



More Information
www.ptun-jakarta.go.id



Our Office
**Jl. A. Sentra Primer Baru Timor
Pulo Gebang, Jakarta Timur**



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	18
BAB III. TELAAHAN	28
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	29



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

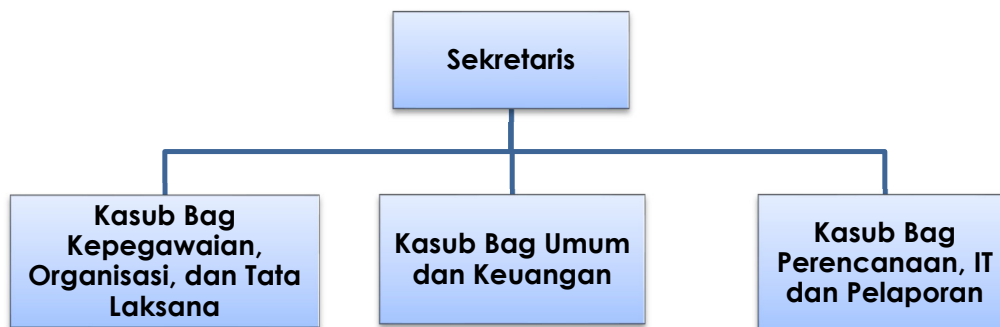
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

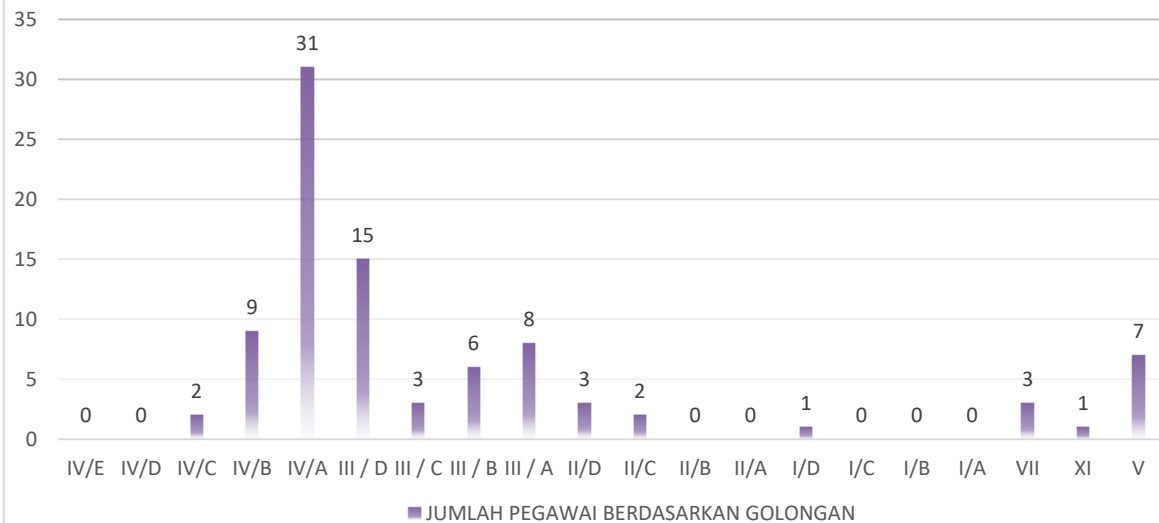
Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 30 September 2025 adalah 78 Orang PNS, 4 orang CPNS, 11 Orang PPPK (P3K), yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 62 orang dan Perempuan 32 Orang.

Adapun rinciannya sebagai berikut :



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	H. Husban, S.H., M.H. NIP.197212231992031002	Ketua PTUN Bandung	Ketua PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
2.	Hari Sunaryo, S.H. NIP.197806192006041001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
3.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H. NIP.198205182006042001	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
4.	Rachmadi, S.H. NIP.197610092006041003	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 04 Agustus 2025
5.	Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H. NIP.198212312007041001	Hakim PTUN Medan	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 11 Agustus 2025
6.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H. NIP.197703172007041001	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	Tmt 14 Agustus 2025



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.	Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	TMT 08 Agustus 2025

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1.	H. Husban, S.H., M.H.	KETUA		TMT 11 Agustus 2025
2.	Hari Sunaryo, S.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
3.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
4.	Rachmadi, S.H.	HAKIM		TMT 04 Agustus 2025
5.	Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.	HAKIM		TMT 11 Agustus 2025
6.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H.	HAKIM		TMT 14 Agustus 2025
7.	Hasyim, S.H.	Penata Layanan Operasional	Panitera Muda Hukum	TMT 29 Agustus 2025
8.	Heru Setiawan, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
9.	Mohamad Rizal Muslim, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	TMT 29 Agustus 2025



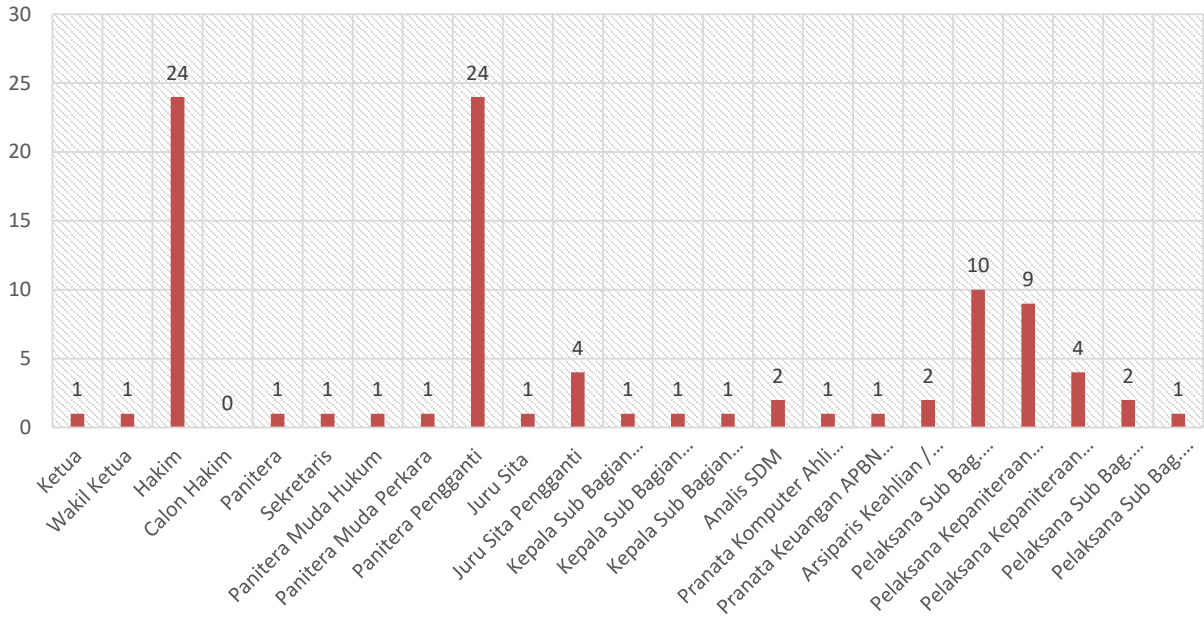
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

10.	Mamat Nurahmat	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	TMT 29 Agustus 2025
11.	Asep Saepudin	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
12.	Dela Wahyudin	Operator Layanan Operasional	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	TMT 29 Agustus 2025
13.	Jana Amelia Lumban Tobing	Operator Layanan Operasional	Panitera Muda Perkara	TMT 29 Agustus 2025
14.	Bagus Nur Ronggo Pameling	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
15.	Rangga Nurhidayat	Operator Layanan Operasional	Sub Bagian Umum Dan Keuangan	TMT 29 Agustus 2025
16.	Devika Rahmanda	Operator Layanan Operasional	Panitera Muda Perkara	TMT 29 Agustus 2025

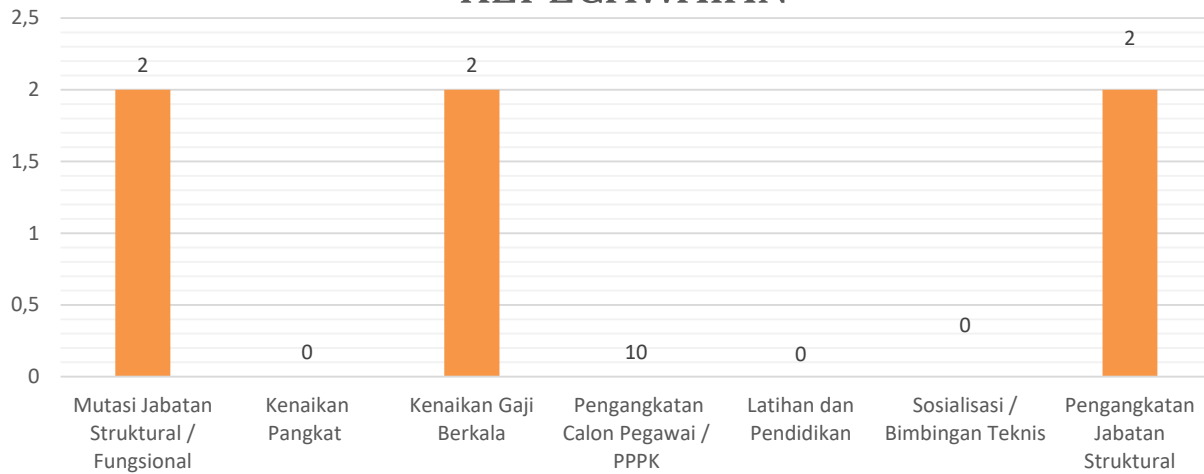


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK			RAHASIA	JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING		
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	7	0	0	7
2		PTTUN Jakarta	1	0	0	1
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	0	0	0	0
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	16	0	4	16
5		PERKARA / LAIN-LAIN	112	0	0	112
6		UMUM / LAIN-LAIN	10	0	0	10
TOTAL						146

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	165	0	0	165
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	25	0	0	25
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	6	0	0	6
4	Kepaniteraan Muda Perkara	222	0	0	222
5	Kepaniteraan Muda hukum	21	0	0	21
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					439

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan September Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
	Total	1626	20	205	1851

Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung expired Agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung.

Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan September 2025 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk dan sampai saat ini jumlah buku yang tercatat sejumlah 1425 eksemplar.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	18,088,379,000	0	14,051,545,099	1,207,258,897	15,258,803,996	84.36 %	2,829,575,004
WA Program Dukungan Manajemen	18,088,379,000	0	14,051,545,099	1,207,258,897	15,258,803,996	84.36 %	2,829,575,004
WA 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
EBB 951 Layanan Sarana Internal	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
053.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,690,000	0	139,500,000	0	139,500,000	99.86 %	190,000
000001. AC 2 PK	89,690,000	0	89,600,000	0	89,600,000	99.90 %	90,000
000002. Mesin Antrian Sidang	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
WA 6966 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	17,948,689,000	0	13,912,045,099	1,207,258,897	15,119,303,996	84.24 %	2,829,385,004
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17,948,689,000	0	13,912,045,099	1,207,258,897	15,119,303,996	84.24 %	2,829,085,004
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
051.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
000095. Printer Hp Laserjet P1102	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	17,947,689,000	0	13,912,045,099	1,207,258,897	15,119,303,996	84.24 %	2,828,385,004
001 Gaji dan Tunjangan	15,492,871,000	0	12,119,027,273	1,186,360,065	13,305,387,338	85.88 %	2,187,483,662
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	15,492,871,000	0	12,119,027,273	1,186,360,065	13,305,387,338	85.88 %	2,187,483,662
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,082,745,000	0	3,828,992,040	320,487,600	4,149,479,640	101.63	-66,734,640
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	3,383,449,000	0	3,129,701,300	320,487,600	3,450,188,900	101.97	-66,739,900
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	347,323,000	0	347,322,120	0	347,322,120	100.00	880
000005. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	351,973,000	0	351,968,620	0	351,968,620	100.00	4,380
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61,000	0	47,099	3,881	50,980	83.57 %	10,020
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,000	0	37,995	3,881	41,876	82.11 %	9,124

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	4,408	0	4,408	88.16 %	592
000008. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	4,696	0	4,696	93.92 %	304
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	369,454,000	0	284,176,364	24,694,718	308,871,082	83.60 %	60,582,918
000009. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	317,710,000	0	232,474,232	24,694,718	257,168,950	80.94 %	60,541,050
000010. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	26,047,000	0	26,042,226	0	26,042,226	99.98 %	4,774
000011. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	25,697,000	0	25,659,906	0	25,659,906	99.86 %	37,094
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	119,988,000	0	92,736,378	8,542,316	101,278,694	84.41 %	18,709,306
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS	103,228,000	0	76,036,094	8,542,316	84,578,410	81.93 %	18,649,590
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	8,444,266	0	8,444,266	99.87 %	10,734
000014. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,305,000	0	8,256,018	0	8,256,018	99.41 %	48,982
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	30,420,000	1,620,000	32,040,000	74.17 %	11,160,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	24,660,000	1,620,000	26,280,000	70.19 %	11,160,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
000017. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	878,015,000	0	739,635,000	14,645,000	754,280,000	85.91 %	123,735,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	851,005,000	0	712,625,000	14,645,000	727,270,000	85.46 %	123,735,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,505,000	0	13,505,000	0	13,505,000	100.00	0
000020. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,505,000	0	13,505,000	0	13,505,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	122,197,000	0	105,212,629	92,129	105,304,758	86.18 %	16,892,242
000021. Belanja Tunj. PPh PNS	96,434,000	0	79,451,524	92,129	79,543,653	82.49 %	16,890,347
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	13,210,000	0	13,208,943	0	13,208,943	99.99 %	1,057
000023. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	12,553,000	0	12,552,162	0	12,552,162	99.99 %	838
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	197,851,440	17,091,120	214,942,560	83.46 %	42,582,440
000024. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	197,851,440	17,091,120	214,942,560	83.46 %	42,582,440
511129 Belanja Uang Makan PNS	1,001,611,000	0	394,273,000	54,901,000	449,174,000	44.85 %	552,437,000
000025. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bln)	340,013,000	0	187,370,000	29,889,000	217,259,000	63.90 %	122,754,000
000026. Gol III (41 org x 22 Hr x 12 Bln)	559,958,000	0	185,518,000	21,127,000	206,645,000	36.90 %	353,313,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 11 dari 29 halaman
Laporan Bulanan Bulan September 2025 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000027. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	92,400,000	0	17,080,000	3,360,000	20,440,000	22.12 %	71,960,000
000028. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,240,000	0	4,305,000	525,000	4,830,000	52.27 %	4,410,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	50,505,000	2,940,000	53,445,000	72.56 %	20,209,000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS	63,845,000	0	40,915,000	2,940,000	43,855,000	68.69 %	19,990,000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	4,795,000	0	4,795,000	97.82 %	107,000
000031. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	4,795,000	0	4,795,000	97.72 %	112,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,187,799,000	0	939,819,131	79,334,385	1,019,153,516	85.80 %	168,645,484
000100. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	837,324,000	0	589,345,482	79,334,385	668,679,867	79.86 %	168,644,133
000101. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	177,013,108	0	177,013,108	100.00 %	892
000102. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 14)	173,461,000	0	173,460,541	0	173,460,541	100.00 %	459
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7,269,700,000	0	5,414,800,000	595,000,000	6,009,800,000	82.67 %	1,259,900,000
000097. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 13)	1,062,200,000	0	1,062,200,000	0	1,062,200,000	100.00 %	0
000098. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 14)	522,100,000	0	522,100,000	0	522,100,000	100.00 %	0
000099. Belanja Tunjangan Pejabat Negara	5,685,400,000	0	3,830,500,000	595,000,000	4,425,500,000	77.84 %	1,259,900,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	31,536,800	55,952,200	87,489,000	220.93 %	-47,889,000
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	25,819,200	55,952,200	81,771,400	241.34 %	-47,889,400
000034. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	772	1,732	2,504	35.77 %	4,496
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
000037. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	612	1,732	2,344	46.88 %	2,656
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	0	2,719,380	2,719,380	73.42 %	984,620
000038. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000
000039. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	0	2,719,380	2,719,380	85.62 %	456,620
000040. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,480,000	0	0	630,544	630,544	42.60 %	849,456
000041. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,270,000	0	0	630,544	630,544	49.65 %	639,456
000042. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
000043. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	3,850,000	350,000	4,200,000	85.71 %	700,000
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	3,150,000	350,000	3,500,000	83.33 %	700,000
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
000046. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,054,000	0	796,620	3,114,060	3,910,680	96.46 %	143,320
000047. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,000	0	651,780	3,114,060	3,765,840	108.34 %	-289,840
000048. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
000049. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	31,500,000	0	4,375,000	630,000	5,005,000	15.89 %	26,495,000
000050. Belanja Uang Makan PPPK	31,500,000	0	4,375,000	630,000	5,005,000	15.89 %	26,495,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,677,000	0	0	3,610,000	3,610,000	215.27 %	-1,933,000
000104. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,677,000	0	0	3,610,000	3,610,000	215.27 %	-1,933,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,454,818,000	0	1,793,017,826	20,898,832	1,813,916,658	73.89 %	640,901,342
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	539,627,000	0	534,111,123	1,627,803	535,738,926	99.28 %	3,888,074
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	539,627,000	0	534,111,123	1,627,803	535,738,926	99.28 %	3,888,074
000051. Keperluan sehari-hari Perkantoran	26,474,000	0	21,104,049	1,627,803	22,731,852	85.86 %	3,742,148
000052. Pramubakti (6 org x 8 bulan)	229,680,000	0	229,680,000	0	229,680,000	100.00 %	0
000053. Satpam (5 org x 8 Bln)	224,774,000	0	224,628,074	0	224,628,074	99.94 %	145,926
000054. THR Pramubakti 6 Org X 1 Bln)	30,624,000	0	30,624,000	0	30,624,000	100.00 %	0
000055. THR Satpam (5 org X 1 bln)	28,075,000	0	28,075,000	0	28,075,000	100.00 %	0
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	233,400,000	0	222,075,924	652,071	222,727,995	95.43 %	10,672,005
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	196,600,000	0	191,389,526	305,871	191,695,397	97.51 %	4,904,603
000056. Langganan Internet	190,000,000	0	189,960,000	0	189,960,000	99.98 %	40,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000057. Lisensi Video Conference	6,600,000	0	1,429,526	305,871	1,735,397	26.29 %	4,864,603
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,800,000	0	2,379,000	0	2,379,000	62.61 %	1,421,000
000058. Biaya Pengiriman Surat Dinas	3,800,000	0	2,379,000	0	2,379,000	62.61 %	1,421,000
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	2,327,398	346,200	2,673,598	44.56 %	3,326,402
000059. Langganan Telephone	6,000,000	0	2,327,398	346,200	2,673,598	44.56 %	3,326,402
522113 Belanja Langganan Air	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000060. Langganan Air	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522141 Belanja Sewa	26,000,000	0	25,980,000	0	25,980,000	99.92 %	20,000
000061. Langganan Web Hosting	26,000,000	0	25,980,000	0	25,980,000	99.92 %	20,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	546,947,000	0	374,465,746	7,593,125	382,058,871	69.85 %	164,888,129
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196,847,000	0	189,628,600	0	189,628,600	96.33 %	7,218,400
000062. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	196,847,000	0	189,628,600	0	189,628,600	96.33 %	7,218,400
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,000,000	0	0	0	0	0.00 %	45,000,000
000063. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	45,000,000	0	0	0	0	0.00 %	45,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	305,100,000	0	184,837,146	7,593,125	192,430,271	63.07 %	112,669,729
000064. Pemeliharaan Lift	54,500,000	0	54,390,000	0	54,390,000	99.80 %	110,000
000065. Bensin Mobil Sewa Ketua	20,000,000	0	16,051,825	0	16,051,825	80.26 %	3,948,175
000066. Pemeliharaan AC Cassete	37,000,000	0	29,257,300	0	29,257,300	79.07 %	7,742,700
000067. Pemeliharaan Laptop	14,600,000	0	4,346,500	4,700,000	9,046,500	61.96 %	5,553,500
000068. Pemeliharaan PC	15,330,000	0	3,000,000	0	3,000,000	19.57 %	12,330,000
000069. Pemeliharaan Printer	10,350,000	0	3,218,000	0	3,218,000	31.09 %	7,132,000
000070. Pemeliharaan AC Split	28,060,000	0	25,109,950	0	25,109,950	89.49 %	2,950,050
000071. Pemeliharaan Mesin Pompa	29,760,000	0	6,900,000	0	6,900,000	23.19 %	22,860,000
000072. Kendaraan Roda 2	9,000,000	0	1,291,900	0	1,291,900	14.35 %	7,708,100
000073. Kendaraan Roda 4	81,000,000	0	39,321,671	2,893,125	42,214,796	52.12 %	38,785,204
000103. Pemeliharaan Barang Elektronik Lainnya	5,500,000	0	1,950,000	0	1,950,000	35.45 %	3,550,000
002.0D Operasional Lainnya	239,914,000	0	72,562,713	11,025,833	83,588,546	34.84 %	156,325,454

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	90,904,000	0	0	0	0	0.00 %	90,904,000
000074. Pakaian Dinas Pramubhakti	4,428,000	0	0	0	0	0.00 %	4,428,000
000075. Pakaian Dinas Hakim 26 Org	21,788,000	0	0	0	0	0.00 %	21,788,000
000076. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org	57,984,000	0	0	0	0	0.00 %	57,984,000
000077. Pakaian Dinas CPNS 2 Org	1,676,000	0	0	0	0	0.00 %	1,676,000
000078. Pakaian Dinas PPPK 1 Org	838,000	0	0	0	0	0.00 %	838,000
000079. Pakaian Dinas Satpam	4,190,000	0	0	0	0	0.00 %	4,190,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,760,000	0	39,240,000	8,880,000	48,120,000	59.58 %	32,640,000
000080. Honor PPABP	5,880,000	0	0	0	0	0.00 %	5,880,000
000081. Honor KPA	21,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	58.33 %	9,000,000
000082. Honor PPK	21,000,000	0	10,500,000	3,500,000	14,000,000	66.67 %	7,000,000
000083. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	9,000,000	0	4,500,000	1,500,000	6,000,000	66.67 %	3,000,000
000084. Honor Bendahara Penerimaan	3,600,000	0	1,800,000	600,000	2,400,000	66.67 %	1,200,000
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	3,960,000	1,320,000	5,280,000	66.67 %	2,640,000
000086. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11,760,000	0	5,880,000	1,960,000	7,840,000	66.67 %	3,920,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68,250,000	0	33,322,713	2,145,833	35,468,546	51.97 %	32,781,454
000087. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	68,250,000	0	33,322,713	2,145,833	35,468,546	51.97 %	32,781,454
002.0G Konsultasi ke Pusa/Tingkat Banding	23,325,000	0	992,000	0	992,000	4.25 %	22,333,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,200,000	0	992,000	0	992,000	4.47 %	21,208,000
000088. Transportasi (2 org x 3 kegiatan)	2,700,000	0	0	0	0	0.00 %	2,700,000
000089. Uang Harian (2 org x 3 hari x 3 kegiatan)	4,950,000	0	0	0	0	0.00 %	4,950,000
000090. Tiket (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	8,250,000	0	0	0	0	0.00 %	8,250,000
000091. Penginapan (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	6,300,000	0	992,000	0	992,000	15.75 %	5,308,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,000	0	0	0	0	0.00 %	1,125,000
000092. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1,125,000	0	0	0	0	0.00 %	1,125,000
002.0H Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPB/KPKN/LKANWIL DJKN/BKNI/BKD	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 13 dari 29 halaman
Laporan Bulanan Bulan September 2025 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000093. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1,125,000	0	120,320	0	120,320	10.70 %	1,004,680
002.01 Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870,480,000	0	588,690,000	0	588,690,000	67.63 %	281,790,000
522141 Belanja Sewa	870,480,000	0	588,690,000	0	588,690,000	67.63 %	281,790,000
000094. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (26 Orang x 12 Bln)	870,480,000	0	588,690,000	0	588,690,000	67.63 %	281,790,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000096. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	81,750,000	17,690,000	26,745,000	0	26,745,000	32.72 %	37,315,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	81,750,000	17,690,000	26,745,000	0	26,745,000	32.72 %	37,315,000
BF-1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81,750,000	17,690,000	26,745,000	0	26,745,000	32.72 %	37,315,000
AEA Koordinasi	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
051 Pelaksanaan Pengamanan Sidang	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
051.0A Pelaksanaan	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
521211 Belanja Bahan	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x 30 kali)	30,000,000	0	8,280,000	0	8,280,000	27.60 %	21,720,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	1,060,000	0	405,000	0	405,000	38.21 %	655,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,060,000	0	405,000	0	405,000	38.21 %	655,000
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1,060,000	0	405,000	0	405,000	38.21 %	655,000
051.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	405,000	0	405,000	0	405,000	100.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00 %	0
000002. Pengiriman Pembertahuan/Panggilan	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00 %	0
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00 %	0
000004. Alat Tulis Kantor	125,000	0	125,000	0	125,000	100.00 %	0
051.0B Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	655,000	0	0	0	0	0.00 %	655,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	0	0	0	0.00 %	180,000
000005. Pengiriman Pembertahuan/Panggilan	180,000	0	0	0	0	0.00 %	180,000
521211 Belanja Bahan	225,000	0	0	0	0	0.00 %	225,000
000006. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000007. Alat Tulis Kantor	125,000	0	0	0	0	0.00 %	125,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
000008. Biaya Permohonan Banding disetor ke PTTUN	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	0	18,060,000	0	18,060,000	54.73 %	14,940,000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,000,000	0	18,060,000	0	18,060,000	54.73 %	14,940,000
051 Pos Bantuan Hukum	33,000,000	0	18,060,000	0	18,060,000	54.73 %	14,940,000
051.0A tanpa sub komponen	33,000,000	0	18,060,000	0	18,060,000	54.73 %	14,940,000
521211 Belanja Bahan	4,200,000	0	1,260,000	0	1,260,000	30.00 %	2,940,000
000009. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,200,000	0	1,260,000	0	1,260,000	30.00 %	2,940,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	58.33 %	12,000,000
000010. Jasa Layanan Konsultan Hukum (3 Jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 Bln)	28,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	58.33 %	12,000,000
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
051 Sidang di luar Gedung Pengadilan	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	300,000	0	0	0	0.00 %	0
000011. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300,000	300,000	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,390,000	17,390,000	0	0	0	0.00 %	0
000012. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00 %	0
000013. Tiket 7 Org x 1 Keg	4,636,000	4,636,000	0	0	0	0.00 %	0
000014. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6,944,000	6,944,000	0	0	0	0.00 %	0
000015. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 15 dari 29 halaman
Laporan Bulanan Bulan September 2025 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan September 2025 agenda rapat meliputi :

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPFH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebuah organisasi yang diibaratkan seperti sebuah mobil, dimana jika mobil ingin bergerak maka harus saling bekerjasama tanpa terkecuali sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu sarana agar organisasi PTUN Jakarta dapat bekerja dengan baik yaitu pada kesempatan rapat bulanan, dimana kesempatan ini adalah fasilitas untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, tanya jawab, diskusi, dll, bukan hanya komunikasi 1 arah dari pimpinan saja;
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat peningkatan kinerja yang dilakukan oleh seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara dibandingkan pada bulan sebelumnya, dan memberikan apresiasi dengan telah ditindaklanjutinya temuan dari Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa pengelolaan dan penataan BMN sedang berjalan dan pada saat ini telah disusun tim pengelola BMN PTUN Jakarta, diharapkan tim dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga kedepannya BMN di PTUN Jakarta menjadi lebih tertata, rapi, dan tidak ada yang terbengkalai;
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh Hakim dan ASN agar selalu menjaga integritas, disiplin, tertib, dan bekerja sesuai



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- dengan aturan yang berlaku, misalnya saja jika ingin keluar kantor harus mengisi form keluar kantor, dll;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh peserta rapat bahwa kedisiplinan harus selalu ditingkatkan dan wajib dilakukan pengawasan kedisiplinan oleh setiap atasan secara berjenjang;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengingatkan Kembali kepada seluruh pengurus PTWP, Bapor, Pengelola Dana Sosial supaya pada rapat bulanan berikutnya untuk memberikan laporan kondisi keuangannya seperti sebelum-sebelumnya agar dapat diketahui oleh seluruh warga PTUN Jakarta;
 8. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan laporan bahwa Telah bersurat secara resmi kepada Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung terkait kejelasan status organisasi PTUN Jakarta;
 9. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan laporan penyerapan anggaran DIPA 01 telah terealisasi sebesar 84%;
 10. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta menyampaikan bahwa Akan selalu memantau MIS, E-Court, dan SIPP dalam rangka peningkatan kinerja jajaran di bawahnya.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

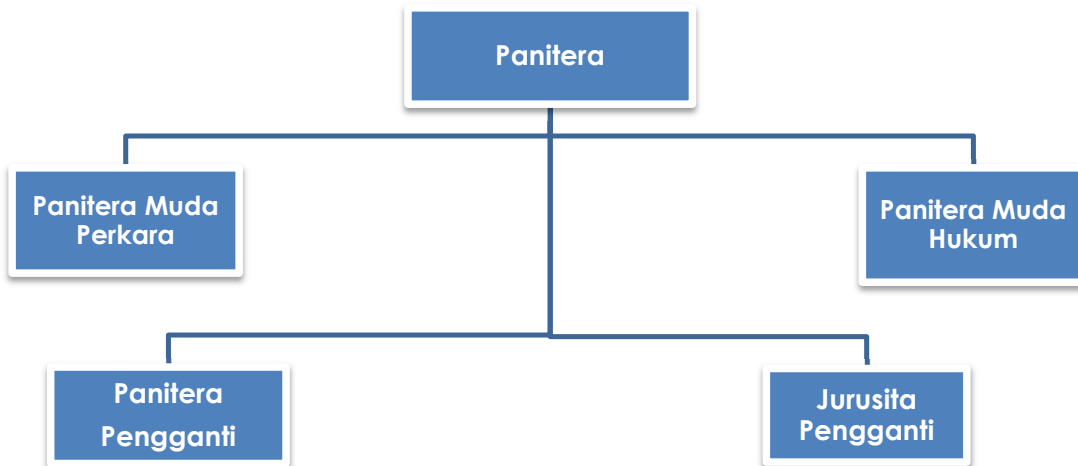


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.



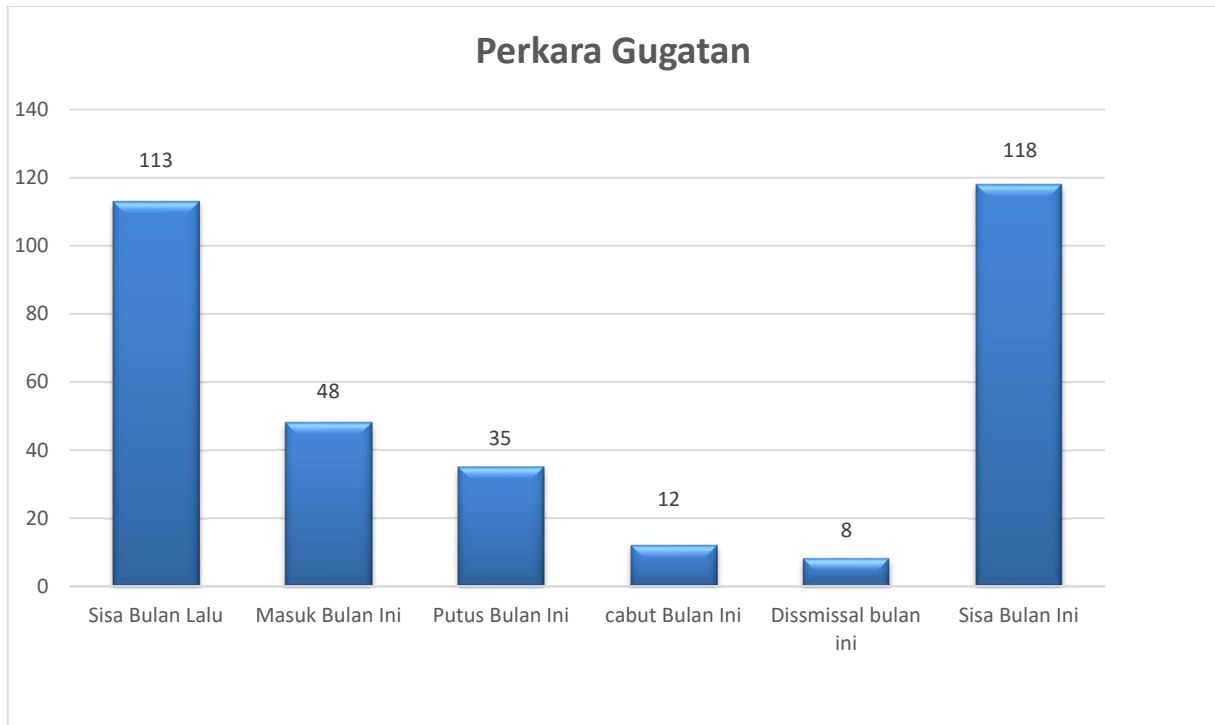
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2025.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

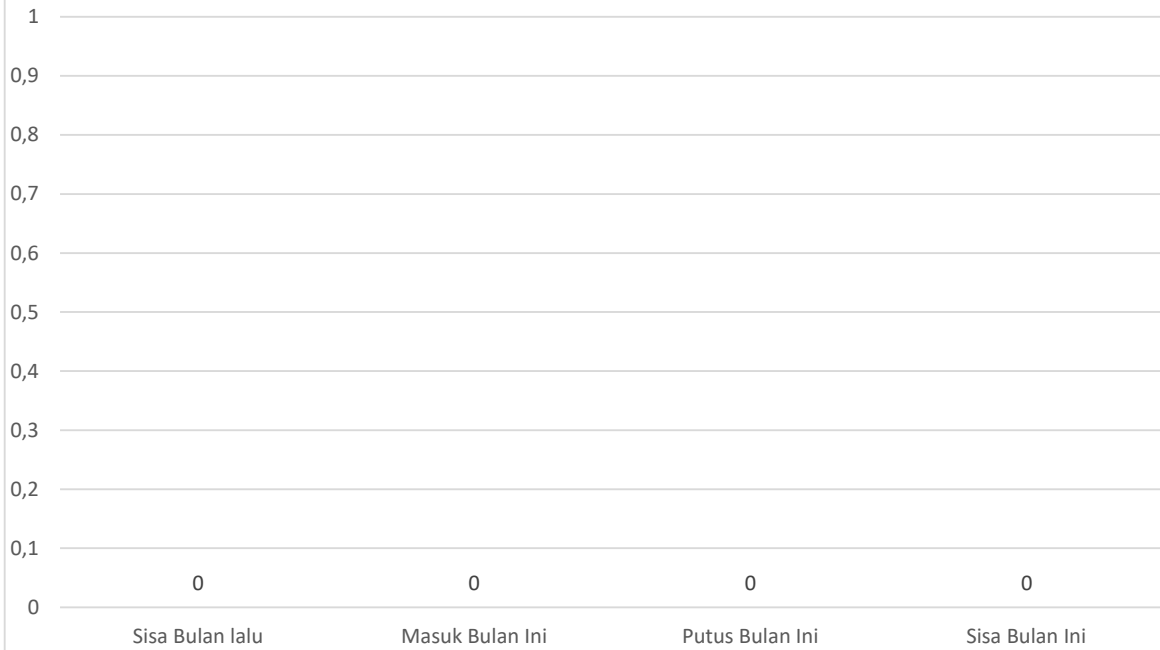


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $12 + 8 + 35 = 45$ Perkara

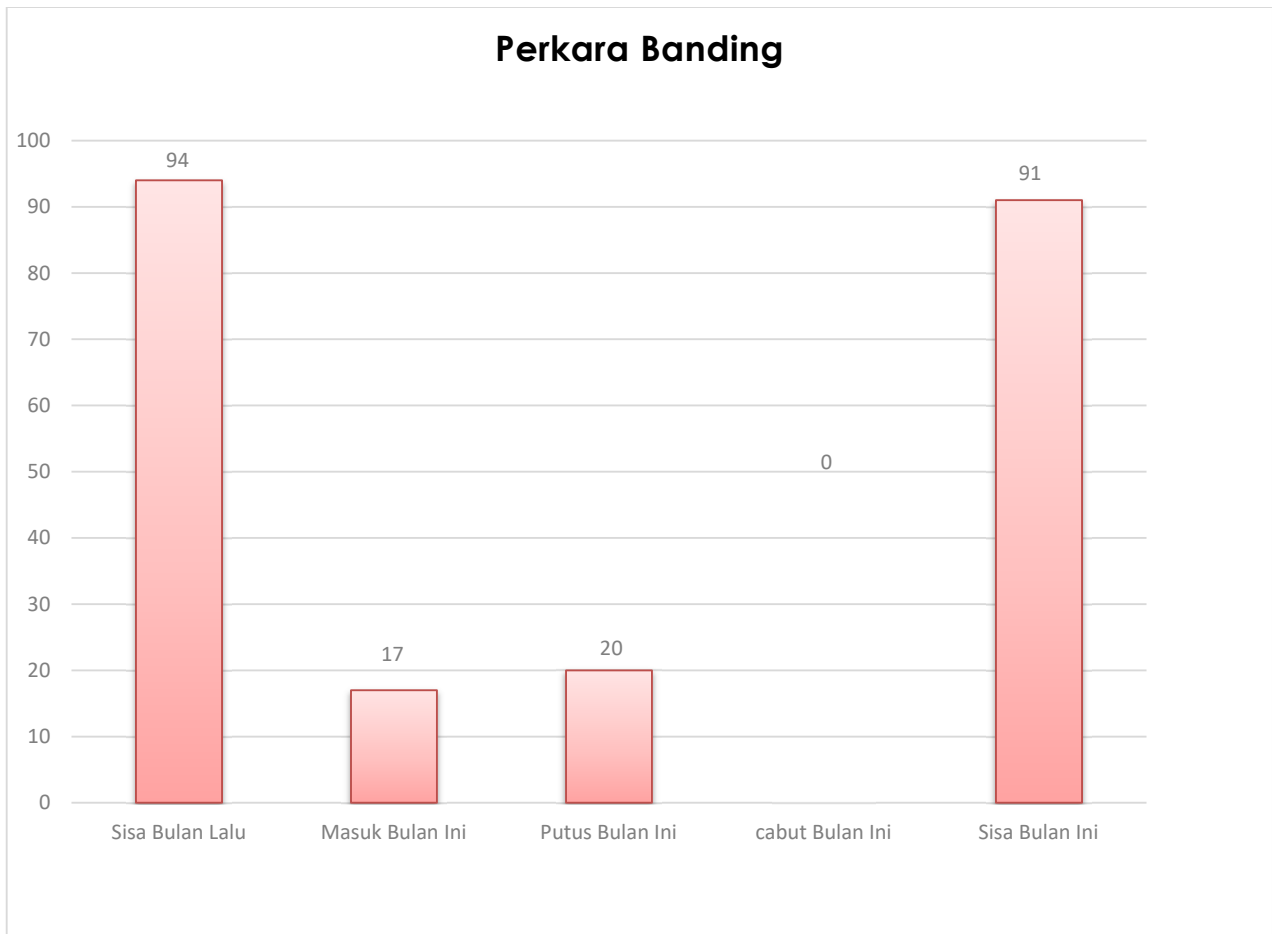


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

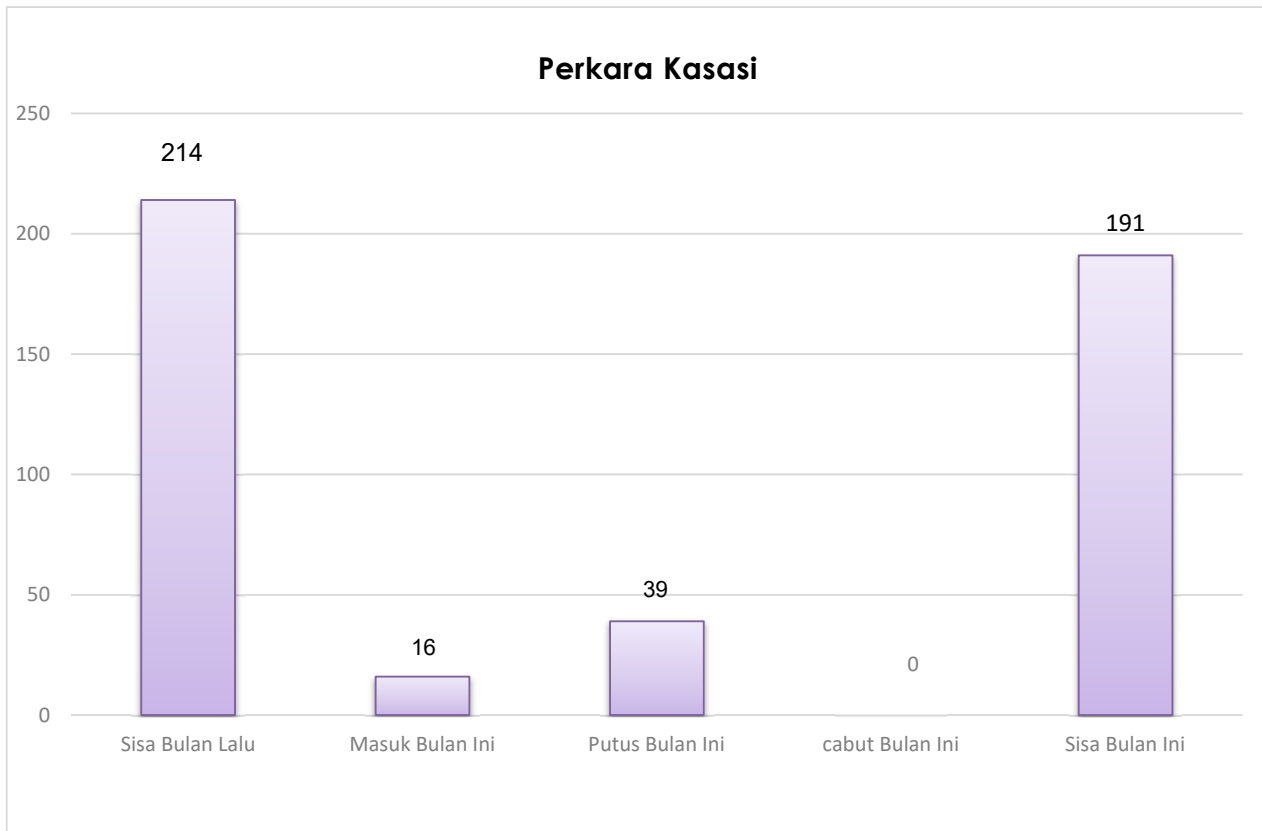
Perkara Perlawanan



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan September 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Ssa Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Tergugat		Perlawanan		Putusan				Pemohonan		Tenita Berkas		Keterangan								
			Masuk	Dicabut	Jumlah	Perorangan	Badan Hukum	Putat	Daerah	Ditentang	Ditentang Tidak Diterima	Ditentukan	Gugur	Dicabut	Ditentukan	Teak	Jumlah	Ssa Perkara		Bandang	Kesasi	Perinjauan Kembali	Perinjauan Kembali	Esekusi	Bandang	Kesasi	Perinjauan Kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	15	6	1	20	4	2	3	3	-	-	-	-	1	-	3	1	5	15	3	3	-	-	1	5	-	
2	Kepegawaian	12	1	-	13	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	5	8	2	1	-	1	3	-	-	
3	Perjinan	10	9	1	18	1	8	8	1	2	-	-	-	-	-	2	1	5	13	3	5	-	1	3	3	-	
4	Lingkungan Hidup	2	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol	20	8	3	26	4	4	8	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22	4	3	-	-	3	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	4	5	-	9	3	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	-	-	-	-	-	2	-	
13	Pengadaan Tanah	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Postif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	8	6	1	13	4	2	6	-	2	-	-	-	-	1	-	3	10	1	1	5	-	2	20	-		
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Lain Lain	40	11	4	49	9	2	8	3	2	-	-	-	1	2	4	1	10	39	3	3	1	-	8	9	-	
	JUMLAH	113	48	10	154	27	21	39	9	8	-	-	-	2	6	14	5	35	118	17	16	6	2	20	39	-	

MENGETAHUI



Jakarta, 30 SEPTEMBER 2025
PANITERA

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 1973 10 12 2000 03 1003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan September 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 30 SEPTEMBER 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Pada hari Jumat 12 September 2025 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bapak H. Husban, S.H., M.H. melantik Bapak R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



2. Pada tanggal 26 September 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H. Kegiatan ini di ikuti oleh keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta ibu - ibu Paguyuban PTUN Jakarta. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H mengambil tema "Membangun Budaya Kerja dan Sinergi Melalui Keteladanan Rasulullah SAW", Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diawali sambutan oleh Ketua PTUN Jakarta, Bapak H. Husban, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan dengan tausiyah yang penuh makna oleh Ustadz H. Muhammad Akri, S.Pd.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

3. Pada Selasa, 30 September 2025, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Bapak H. Husban, S.H., M.H., memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Dhonni Adhita Saputra, S.H. sebagai Panitera PTUN Jakarta.



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan mengarah ke rusak berat dan 4 unit lainnya dalam keadaan kondisi rusak berat yang kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk rehab total rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 11 Kendaraan Dinas yang didalamnya ada kendaraan roda 4 dan roda 2 sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak berat dan tahun pembuatannya sudah melebihi penggunaan ekonomis yaitu 20 tahun penggunaan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan anggaran belanja modal pengadaan mobil dinas dan pengajuan tersebut sudah melalui aplikasi SIRUP.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 78 ASN, 4 orang CPNS dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan September 2025 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk Perawatan Gedung dan halaman, serta PC All in One.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



Jakarta, 07 Oktober 2025

Sekretaris,


R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H.

NIP. 198410162008051001









Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekontrusi.
		

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					